



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2024



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah (Provinsi dan Pusat) serta masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019 –2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam

penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Bogor, 4 Februari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH, <u>RUDY MASHUDI, ST, MP</u> Pembina Tingkat I
---	--

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2024 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pengukuran sasaran strategis yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 telah berhasil dicapai. Pada tahun 2024 persentase rata-rata tingkat ketercapaian IKU Bapperida sebesar 96,70%, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Baik	Baik	100	Sangat Baik
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	100	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Point	26	24,43	93,96	Sangat Baik
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	83,87	70	83,46	Tinggi
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	89,90	92,38	102,76	Sangat Baik

*) Data Sementara

Berdasarkan tabel di atas dari Ke 6 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator kinerja yang mencapai target, adapun indikator kinerja yang mencapai target yaitu

1. Kategori Inovasi Daerah (100%);
2. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (100%);
3. Indeks Kualitas Kebijakan (100%);
4. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah (102,76%).

Selanjutnya berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 yang di turunkan dari hasil penjabaran Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Tahun 2019-2024, yang memuat Sasaran, Program, dan

Anggaran yang mendukung untuk pencapaian sasaran Bapperida pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.768.902.900	2.651.179.550	95,75
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	856.940.800	834.717.800	97,41
2	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	1.527.510.070	1.494.615.890	97,85
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.755.985.035	17.630.885.838	99,30
TOTAL			22.909.338.805	22.611.399.078	98,70

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian untuk 3 sasaran strategis didukung oleh 4 Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp.22.909.338.805, dengan realisasi sebesar Rp.22.611.399.078 (98,70%).

Dari hasil evaluasi pada setiap sasaran menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ke depan yaitu untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bogor, berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2024.

2. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah melalui proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
4. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
5. Secara internal melakukan perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bapperida dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil Keputusan dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM BAPPERIDA KOTA BOGOR	2
1) <i>Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</i>	2
2) <i>Data Pegawai</i>	3
3) <i>Cascading Kinerja</i>	4
4) <i>Peta Proses Bisnis</i>	4
5) <i>Isu Strategis</i>	5
6) <i>Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024</i>	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA.....	10
C. RENCANA ANGGARAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
1) <i>Sasaran Strategis Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah</i>	16
1.1 Kategori Inovasi	17
1.2 Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	22
1.3 Indeks Kualitas Kebijakan	24
2) <i>Sasaran Strategis Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah</i>	26
2.1 Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari Hasil Penilaian SAKIP Tingkat Kota	27
2.2 Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	28
3) <i>Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel</i>	31
3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	31
B. ANALISIS EFISIENSI	34
BAB IV PENUTUP.....	37
A. KESIMPULAN.....	38
B. RENCANA TINDAK LANJUT	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Bapperida Tahun 2024	4
Tabel 2 Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.....	6
Tabel 3 Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	8
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.....	11
Tabel 5 Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024.....	11
Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel 7 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024.....	14
Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional.....	15
Tabel 9 Inovasi Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2024	21
Tabel 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024..	30
Tabel 11 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida kota Bogor Tahun 2024	33
Tabel 12 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2024.....	34
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	36
Tabel 14 Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	3
Gambar 2 Cascading Kinerja Bapperida	4
Gambar 3 Peta Proses Bisnis	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

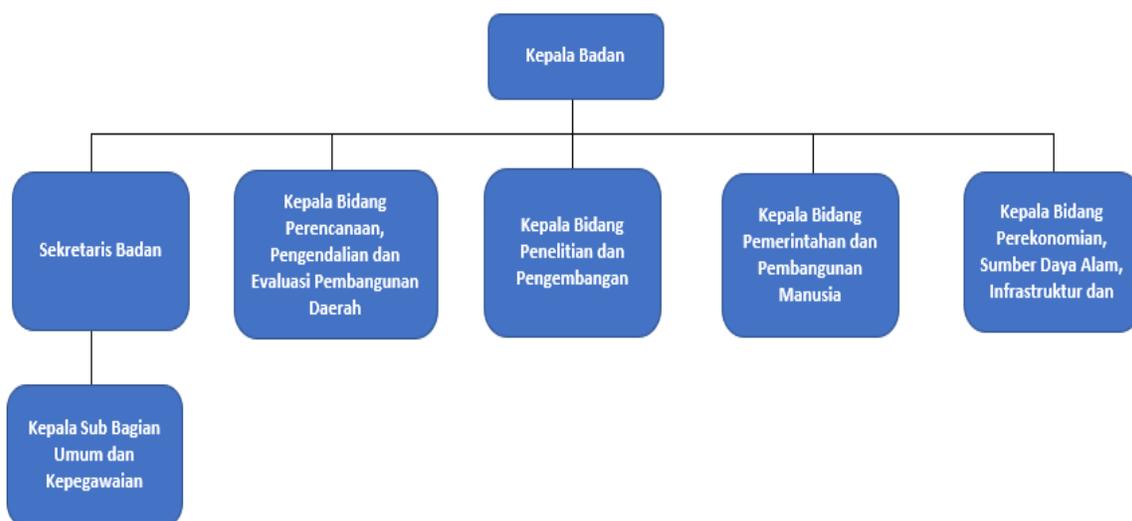
C. Gambaran Umum Bapperida Kota Bogor

1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dasar Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor adalah Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor adalah unsur penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, dapat disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 1 Struktur Organisasi

2) Data Pegawai

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Berjumlah 61 orang yang terdiri dari 43 orang PNS, 3 orang P3K, dan 15 orang tenaga administrasi Non ASN, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Pegawai Bapperida Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d tahun 2023)		
		PNS	P3K	Non PNS
A	Jabatan Struktural			
1	Kepala	1	0	0
2	Sekretaris	1	0	0
3	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0
4	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	0	0
5	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah	1	0	0
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0
B	Jabatan Fungsional			
1	Perencana Ahli Madya	3	0	0
3	Analisis Kebijakan Muda	2	0	0
4	Perencana Ahli Muda	17	0	0
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	0	0
6	Pranata Komputer Muda	1	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	2	0	0
8	Pranata Komputer Pertama	0	3	0
C	Jabatan Pelaksana			
1	Analisis SDM Aparatur	1	0	0
2	Bendahara	1	0	0

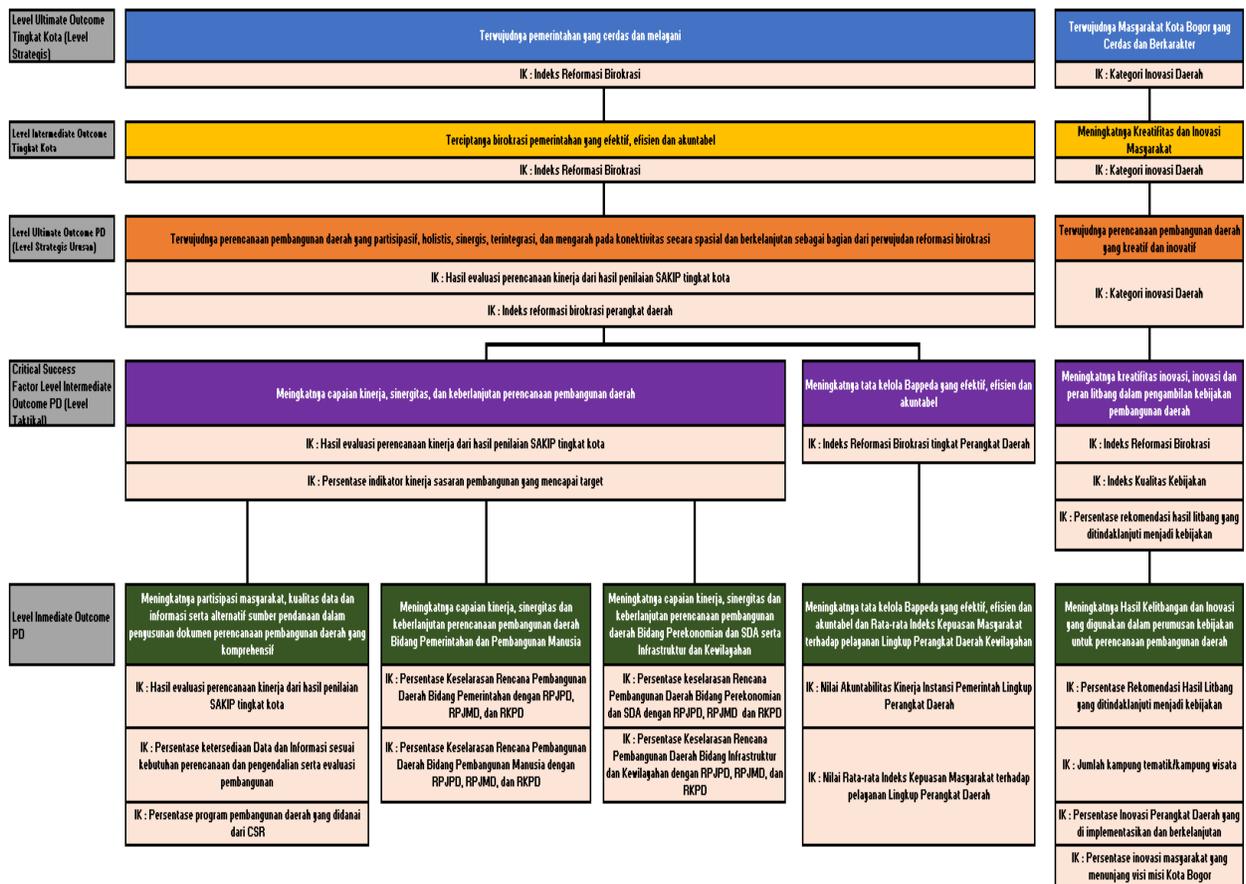
No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d tahun 2023)		
		PNS	P3K	Non PNS
3	Pengelola Keuangan	1	0	0
4	Pegadminitrasi Umum	0	0	15
5	Analisis Perencanaan	1	0	0
6	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0
7	Analisis Tata Ruang	1	0	0
8	Pengelola Geospasial	1	0	0
9	Analisis Perencanaan Anggaran	1	0	0
10	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	1	0	0
11	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0	0
JUMLAH		43	3	15

Tabel 1 Pegawai Bapperida Tahun 2024

3) Cascading Kinerja

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menyusun cascading kinerja sebagai berikut :

Gambar 2
Cascading Kinerja Bapperida



Gambar 2 Cascading Kinerja Bapperida

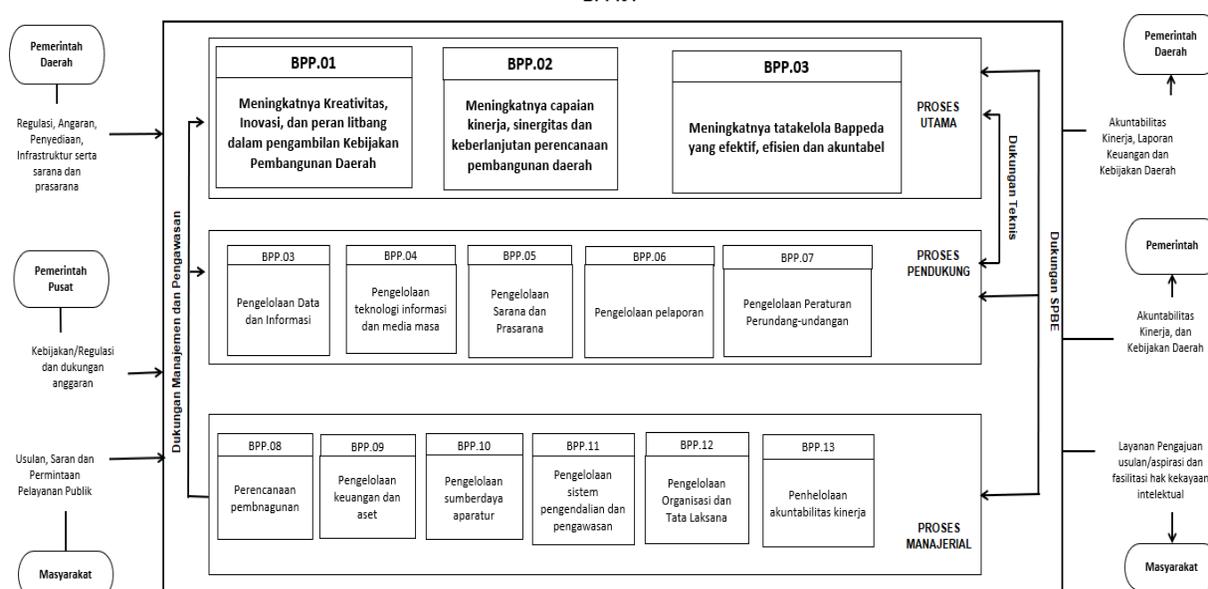
4) Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Demi terwujudnya hubungan kinerja yang efektif dan efisien maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Nomor 000.8.3.1/13 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Gambar 3

**PETA PROSES BISNIS
BPP.01**



Gambar 3 Peta Proses Bisnis

5) Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024, terdapat 4 (empat) Isu Strategis yaitu:

- 1) Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
- 2) Penguatan perencanaan partisipatif;
- 3) Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dapat dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 2

Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; 2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
2.	Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	
3.	Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	
4.	Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;	
5.	Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;	
6.	Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran kelitbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
7.	Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	
8.	Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	
9.	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja
10.	Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	
11.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang	
12.	Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;	Penguatan perencanaan partisipatif
13.	Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;	Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2 Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

6) Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor Nomor 700/29/VI-LHE/2024/Itda Tanggal 07 Juni 2024 terdapat kelemahan atas evaluasi dan rekomendasi yang kemudian disusun rencana tindak lanjutnya yaitu:

Tabel 3

Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

NO	KOMPONEN EVALUASI	KELEMAHAN ATAS HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT ATAS KELEMAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi Perencanaan Kinerja	<p>Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dapat dicapai (achievable), sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan pada tahun 2022, masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 98,75% dan Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah, dengan capaian 91,45%; Dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan pada tahun 2023, masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 96,20% dan Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target, dengan capaian 88,00%. 	<p>Memastikan seluruh target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik, melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, memastikan data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan melakukan evaluasi terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> pencapaian target IKU pada akhir tahun berkenaan; dan perbaikan/peningkatan capaian IKU dari tahun sebelumnya 	<p>Penyusunan Laporan Evaluasi triwulan atas sasaran dan program melalui evaluasi</p>	<p>Laporan evaluasi capaian Kinerja IKU Bapperida Tahun 2024, Laporan Evaluasi RKPD per Triwulan Bapperida Tahun 2024, Laporan Evaluasi RKPD Kota Bogor per Triwulan 2024</p>
		<p>Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik, serta perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik belum sepenuhnya dilaksanakan. Dimana dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja tahun 2023, masih terdapat 2 (dua) IKU tidak tercapai yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 96,20% dan Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target, dengan capaian 88,00%</p>	<p>Memastikan setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap target program secara berkala serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut dalam pencapaian target program pada akhir tahun berkenaan.</p>	<p>Penyusunan Laporan evaluasi setiap triwulan atas sasaran dan program melalui evaluasi</p>	<p>Laporan evaluasi capaian Kinerja IKU Bapperida Tahun 2024, Laporan Evaluasi RKPD per Triwulan Bapperida Tahun 2024, Laporan Evaluasi RKPD Kota Bogor per Triwulan 2024</p>
				<p>Penyusunan Kepwal tentang metadata masing-masing indikator dengan Perangkat Daerah terkait dan reformulasi indikator</p>	<p>Keputusan Wali Kota Bogor nomor 000.7/Kep.208-Bapperida/2024 tentang Meta Data indikator, Tujuan, Sasaran, Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026</p>

NO	KOMPONEN EVALUASI	KELEMAHAN ATAS HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT ATAS KELEMAHAN
1	2	3	4	5	6
		<p>Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari 5 (lima) IKU tahun 2022, masih terdapat 2 (dua) IKU yang tidak tercapai, yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 98,75% dan Indeks • Dari 6 (enam) IKU tahun 2023, masih terdapat 2 (dua) IKU yang tidak tercapai, yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 96,20% dan Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target, dengan capaian 88,00%. 	<p>Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, salah satunya dengan mengungkapkan kelemahan atas ketidaktercapaian IKU tahun sebelumnya pada bab IV LKIP.</p>	<p>Perbaikan dokumen LKIP Bapperida tahun 2023 dan Penyusunan LKIP Bapperida Tahun 2024 di sertakan data ketidaktercapaian IKU tahun sebelumnya</p>	<p>Perbaikan Dokumen LKIP 2023 dan LKIP 2024</p>

Tabel 3 Rencana Tindakanlanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menjalankan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan mendukung mendukung Misi ke 2 Kota Bogor yang dijabarkan kembali dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menjadi 2 tujuan, 3 sasaran strategis dan 6 indikator sasaran.

Visi Kota Bogor

“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga”

Misi 2

“Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”

Tujuan RPJMD	Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani (Smart Government)	
Indikator Tujuan RPJMD	Kategori Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	
Indikator Sasaran RPJMD	Kategori Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	
Tujuan Renstra	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	
Indikator Tujuan Renstra	Kategori Inovasi Daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah
Sasaran Renstra	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel
Indikator Sasaran Renstra	Kategori Inovasi Daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah
	Indeks Kualitas Kebijakan	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan		

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Bogor

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Kategori	Inovatif
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	Baik
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	100
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	26
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	83,87
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	89,9

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.909.338.805.- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	22.835.097.605	22.537.590.738	98,70
2	Belanja Modal	74.241.200	73.808.340	99,42
JUMLAH		22.909.338.805	22.611.399.078	98,70

Tabel 5 Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tercermin dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator mencapai target atau lebih dan sebanyak 2 indikator tidak mencapai target. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Baik	Baik	100	Sangat Tinggi
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Point	26	24,43	93,96	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	83,87	70	83,46	Tinggi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	89,90	92,38	102,76	Sangat Tinggi

Tabel 7 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024

*) Data Sementara

Cara perhitungan:

1. Total Skor Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (Dasar Penetapan oleh Kemendagri)
2. Hasil Pengukuran IKK oleh Lembaga Administrasi Negara
3. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100
4. Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
5. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100
6. Nilai hasil evaluasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kota Bogor

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata tingkat ketercapaian dari ke 6 target indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 96,70%. Persentase indikator kinerja sasaran yang pencapaiannya tertinggi adalah Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah sebesar 102,76% (Sangat Tinggi), sedangkan yang paling rendah Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target sebesar 83,46% (Tinggi), jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, pencapaian di tahun 2024 ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTAR (%)	REALISASI PROVINSI	RATA-RATA REALISASI NASIONAL
Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100	Sangat Inovatif	Inovatif
Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Sangat Baik	57,73
Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	-
Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Point	25	24,05	26	24,43	26	93,96	26,32	-
Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	80,65	67,74	83,87	70	83,87	83,46	95**	-
Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	81	89,8	89,90	92,38	89,90	102,76	93,08**	59,32

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional

*) Data Sementara

***) Data Tahun Lalu

Cara perhitungan:

1. Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (Dasar Penetapan oleh Kemendagri)
2. Hasil Pengukuran IKK oleh Lembaga Administrasi Negara
3. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100
4. Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
5. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100
6. Nilai hasil evaluasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja tahun 2024 jika di bandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024, sudah mencapai target yang telah di tetapkan, penjelasa masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan 3 indikator kinerja yaitu Kategori Inovasi daerah, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, dalam pencapaiannya di dukung oleh 1 Program dan 4 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah				
Indikator Sasaran	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Kategori Inovasi Daerah</td></tr> <tr><td>Indeks Kualitas Kebijakan</td></tr> <tr><td>Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan</td></tr> </table>	Kategori Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	
Kategori Inovasi Daerah					
Indeks Kualitas Kebijakan					
Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan					
Program	Penelitian dan Pengembangan				
Indikator Program	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan</td></tr> <tr><td>Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan</td></tr> <tr><td>Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor</td></tr> <tr><td>Jumlah kampung tematik/kampung wisata</td></tr> </table>	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	Jumlah kampung tematik/kampung wisata
Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan					
Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan					
Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor					
Jumlah kampung tematik/kampung wisata					
Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</td></tr> <tr><td>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</td></tr> <tr><td>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</td></tr> <tr><td>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</td></tr> </table>	Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
Pengembangan Inovasi dan Teknologi					

1.1 Kategori Inovasi



Keberhasil Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Kota Bogor yang tercermin dari pencapaian target Kategori inovasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, Kota Bogor mendapat peringkat ke-41 dari 93 Kota se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi sebesar 57,04 point yang masuk dalam kategori **“Inovatif”**. Indeks inovasi daerah artinya Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Meskipun masih dalam kategori yang sama yaitu **“Inovatif”**, tetapi realisasi Indeks inovasi Kota Bogor mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 realisasinya sebesar 56,82, mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,22 point menjadi 57,04. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), realisasi tahun 2024 telah memenuhi capaian target yang telah di tetapkan pada tahun akhir tahun, yaitu **“Inovatif”**. Apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi kategori inovasi Nasional, realisasi Kota Bogor sama dengan rata-rata realisasi kategori inovasi Nasional yaitu **“Inovatif”**. Selanjutnya jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kategori inovasi Provinsi Jawa Barat, realisasi kategori Kota Bogor juga berada pada

posisi yang sama yaitu **“Inovatif”**, dan Kota Bogor berada pada posisi 5 dalam kategori Kota se Provinsi Jawa Barat.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian kategori inovasi daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan di tandai dengan Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan di Kota Bogor sebesar 95,65%, hal ini disebabkan karena Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah dimana Terfasilitasinya pengembangan Inovasi Perangkat Daerah dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Bogor Innovation Award (BIA)
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah
3. Pelaksanaan Workshop Inovasi Daerah
4. *Pelaksanaan coaching clinic IGA 2024*

Dari hasil fasilitasi tersebut menyebabkan bertambahnya inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar 61 inovasi menjadi 70 inovasi pada tahun 2024 yang berarti bertambah sebanyak 9 inovasi perangkat daerah. Dari 70 Inovasi tersebut yang diinput pada aplikasi, hanya 27 inovasi yang di ikutsertakan pada penilaian Innovative Government Award (IGA) karena dari hasil penilaian kematangan ke 27 inovasi tersebut memiliki nilai kematangan yang tinggi, rincian inovasi perangkat daerah kota bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Inovasi Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Approve
1	SIMASDA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	111
2	SMART BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	108
3	e-SPPT PBB P2 Kota Bogor	Badan Pendapatan Daerah	108
4	e-Sewa BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	105
5	LAKSA PEDAS DAN LAPIS BOGOR	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	104
6	SIBADRA (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran)		104
7	LAPAK ON (Layanan Pajak Online)	Badan Pendapatan Daerah	103
8	PAKUAN PRIMA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	103
9	Bogor Innovation Award	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	102
10	SMART MERAPAT (Melayani Masyarakat dengan Cepat)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Approve
11	SIPROKSI (Sistem Pengendalian Proyek Konstruksi) V.3.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	100
12	SIAPMANG (Sistem Informasi Aspirasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	99
13	SABUMI (Sistem Aplikasi Bangunan Rumah Milik) V.2.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	98
14	PERKAWIS (Peta Digital Kepariwisataaan)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97
15	SIKELUPAS (Sistem Informasi dan Keluhan Pasien)	UPTD PKM Pondok Rumput	97
16	AKSI GEULIS (Akselerasi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan	96
17	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG)	Sekretariat Daerah	96
18	LAKSA KOTA BOGOR - Layanan Informasi Kepariwisataaan Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	95
19	SIPRANATA (Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas) V.3.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	95
20	Posrem 5.0 (Posyandu Remaja dalam Perspektif Society 5.0)	UPTD PKM Gang Aut	95
21	Aplikasi AUSEP (Administrasi Usulan Perpindahan Pegawai)	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	95
22	Sistem Informasi Pelaporan Pengadaan Barang Jasa (SIPPBJ)	Sekretariat Daerah	94
23	BSW (Bogor Single Window)	Dinas Komunikasi dan Informatika	94
24	SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	93
25	Aplikasi K-Pamela (Kenaikan Pangkat Menggunakan Layanan Aplikasi)	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	91
26	LAPIS TALAS KANG RANDI (Lakukan Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Sampai Tuntas dengan Kantong Persalinan Digital)	UPTD PKM Sindang Barang	91
27	SIMA PANGERAN (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor)	Dinas Perhubungan	89
28	Aplikasi AUSEP (Administrasi Usulan Perpindahan Pegawai) ke Luar Pemerintah Daerah Kota Bogor	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	89
29	SIMPELA B3 (Sistem Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	Dinas Lingkungan Hidup	86
30	PELITA HATI (Peduli Wanita Cek Kesehatan Sejak Dini)	UPTD PKM Bogor Utara	82
31	SI KASAI (Sistem Input Bank Sampah Berbasis Aplikasi)	Dinas Lingkungan Hidup	81
32	Layanan Jam Buka Sabtu dan Minggu	Dinas Arsip dan Perpustakaan	80

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Approve
33	SIMAE (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik)	Dinas Perhubungan	80
34	Gotong Royong Atasi Stunting (Go-Roasting)	Kecamatan Bogor Barat	77
35	PAGER BUDE (Pahami Gerakan Beyond Use Date)	UPTD PKM Bogor Selatan	77
36	SIGAPADIMAS (Siap Jaga Persalinan di Puskesmas)	UPTD PKM Bogor Timur	76
37	SI MATA BUBA	UPTD PKM Bogor Utara	76
38	AMEL DILIHAT (Ayo Melahirkan di Fasilitas Kesehatan)	UPTD PKM Mulyaharja	75
39	BOSEL SQUAD FORUM (BOSS FORUM)	Kecamatan Bogor Selatan	73
40	GARDU SIHATI (Gerakan Terpadu Atasi Hipertensi)	UPTD PKM Gang Kelor	72
41	SICANTIK DARA (Skrining IVA/VBE untuk Mendeteksi Kanker Serviks dan Kanker Payudara)	UPTD PKM Bogor Timur	72
42	KASI CINTA (Kegiatan ASI Eksklusif sebagai Cara Inisiasi Berantas Stunting)	UPTD PKM Sindang Barang	72
43	SIPUBERTUA (Sistem Informasi Pelayanan Tuberkulosis Terpadu dan Aktif)	UPTD PKM Pancasan	68
44	JAPATI (Jejaring Aplikasi Anti Putus Sekolah)	Dinas Pendidikan	65
45	SMARTPOSYANDU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64
46	Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan (KPWK) Zaman Now	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57
47	Abon Mama (Agregator Bisnis Online Mahasiswa Magang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	57
48	DARLING (Data Diare Lengkap Jaringan dan Jejaring)	UPTD PKM Bogor Utara	47
49	GEMINI		43
50	A.U.S (Afternoon Ultrasound Service)	UPTD PKM Cipaku	42
51	SI-ANTIK (Sistem Pelaporan Juru Pemantau Jentik)	UPTD PKM Belong	37
52	PEPES PEDAS (Pencatatan Pengeluaran Stok dan Pengendalian Kedaluwarsa Obat)	UPTD PKM Gang Kelor	35
53	Sistem Aplikasi Peta Digital Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31
54	BOM TPT (Berantas dengan Obat Masal Terapi Pencegahan Tuberkulosis)	UPTD PKM Pondok Rumput	29

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Approve
55	Sistem Informasi Kota Layak Anak Bogor (SIKLABO)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
56	SIAPIK	Dinas Lingkungan Hidup	10
57	si Kampah KPWK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
58	HAZI (Pertemuan Hari Zona Integritas)	UPTD PKM Bogor Selatan	3
59	SI LANDAK TOP	UPTD PKM Pasir Mulya	0
60	SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0
61	KOIN (Kinerja Organisasi Terintegrasi)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0
62	LASAGNA (Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja	0
63	PUTARAN INDUKSI (Putus Rantai Penularan Infeksi Ibu ke Anak dengan Triple Eliminasi)	UPTD PKM Pulo Armyn	0
64	KERANDA (Karena Merokok Itu Membayakan Hidup Anda)	UPTD PKM Pulo Armyn	0
65	Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0
66	OPTIMALISASI BEYOND USE DATE PADA ETIKET OBAT (OM BUDIE)	UPTD PKM Tegal Gundil	0
67	KETOK BIDAN (Konsultasi Kehamilan Tatalaksana Komplikasi dan Kolaborasi)	UPTD PKM Lawang Gintung	0
68	KANTONG TAWAN NASI	UPTD PKM Bondongan	0
69	ODADING OBAT	Dinas Kesehatan	0
70	Interaksi DGIS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0

Tabel 9 Inovasi Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

Selain itu terdapat juga faktor -faktor yang menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan indeks inovasi daerah Kota Bogor dikarenakan nilai kematangan inovasi yang dibangun oleh perangkat daerah dinilai masih rendah (belum cukup matang), hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- 1) Kurangnya komitmen dari kepala perangkat daerah terkait keberlanjutan inovasi yang dibangun oleh para inovator di perangkat daerah.
- 2) Belum optimalnya transfer knowledge antar SDM, sehingga ketika inovator mendapatkan promosi/rotasi menyebabkan terhentinya inovasi tersebut.
- 3) Masih belum optimalnya administrasi tatakelola inovasi daerah

Dalam rangka mengakselerasi kinerja kategori inovasi daerah tahun 2025 diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi antara lain:

1. Menjadikan Inovasi sebagai salah satu indikator sasaran pada perangkat daerah, untuk mendorong komitmen perangkat daerah Kota Bogor dalam berinovasi.
2. Melaksanakan binbingan teknis kepada perangkat daerah terkait optimalisasi administrasi tatakelola inovasi daerah.

Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Kota Bogor didukung oleh satu program yaitu program penelitian dan pengembangan. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja di atas sebesar 1,69% atau setara dengan Rp. 7.587.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 449.239.700 dengan realisasi sebesar Rp. 441.661.700.

1.2 Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan



Kota Bogor berhasil meningkatkan peran kelitbangan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan daerah yang tercermin dari tercapainya persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% yaitu dari target kinerja sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, realisasi tersebut berarit dari seluruh kelitbangan yang dihasilkan pada tahun 2024 tercapai seluruhnya.

Dari segi realisasi maupun capaiannya masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%, jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka

menengah (Renstra) realisasi maupun capaian tahun 2024 sesuai dengan akhir tahun Renstra yaitu 100%, jika dibandingkan pada rata-rata Nasional capaian ini tidak dapat diperbandingkan karena tidak terdapat indikator yang sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, capaiannya sama sebesar 100%.

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan yaitu meningkatnya Hasil Kelitbangan yang digunakan dalam perumusan kebijakan untuk perencanaan pembangunan daerah, yang di sebabkan karena terlaksananya penyusunan kajian penelitian dan pengembangan ekonomi, Pembangunan, sosial dan kependudukan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan, dimana Pada Tahun 2024 terdapat 6 kajian yang telah dihasilkan oleh Bapperida Kota Bogor dan seluruhnya di jadikan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kajian Strategi Kebijakan Penurunan Ketimpangan Ekonomi di Kota Bogor yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Penurunan Ketimpangan di Kota Bogor;
2. Kajian Indeks Kebahagiaan Anak Muda/Remaja Kota Bogor yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Rencana Aksi Kebahagiaan Anak Muda/Remaja Kota Bogor;
3. Kajian Peningkatan Pelayanan Publik Kota Bogor Berbasis IOT yang ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pemasangan sarana dan prasarana di tempat- tempat umum;
4. Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kampung Tematik yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Rencana Aksi pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik;
5. Kajian Agro Wisata Berbasis Pertanian Organik yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi agro wisata berbasis pertanian organik;
6. Kajian Rencana Induk Pemajuan Riset Dan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Peraturan Wali Kota Kota Bogor tentang Rencana Induk;

Sedangkan faktor yang menjadi masalah saat penyusunan kajian di kota bogor adalah, ketersediaan data yang masih kurang dan keterbatasan sumber daya dimana belum adanya peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan tahun 2025 diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi antara lain melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan pengelolaan data kelitbangan dengan baik sehingga tersedianya data untuk

kebutuhan penyusunan kajian, dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga/universitas untuk mengatasi keterbatasan SDM.

Meningkatkan peran kelitbangan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan daerah didukung oleh satu program yaitu program penelitian dan pengembangan. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja di atas sebesar 2,35% atau setara dengan Rp. 25.316.180 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.078.270.370 dengan realisasi sebesar Rp. 1.052.954.190.

1.3 Indeks Kualitas Kebijakan



Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrument untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Capaian IKK pada tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 karena pengukuran Nasional IKK di lakukan setiap 2 tahun sekali yaitu sebesar 100%, pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2023 dan akan diukur Kembali pada tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, realisasi IKK Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 65 point dimana nilai tersebut masuk dalam kategori **“Baik”** dari target kategori yang telah di tetapkan pada tahun 2024 yaitu **“Baik”**.

Dalam persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra) Indeks Kualitas Kebijakan saat ini telah mencapai target akhir yang telah di tetapkan

pada akhir Renstra yaitu “Baik”, dan realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional karena tidak tersedianya data. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata indeks kualitas kebijakan di Provinsi Jawa Barat yang realisasi nilai 57,73 atau “Cukup”, realisasi Kota Bogor masih lebih tinggi sebesar 7,27 poin dan masuk pada posisi ke 10 dengan posisi pertama se Provinsi Jawa Barat di tempati oleh Kabupaten Bogor.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indeks kualitas kebijakan Kota Bogor yaitu Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan dampak kebijakan terhadap pembangunan Daerah, ditandai dengan Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan Pelatihan Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kota Bogor yang di ikuti oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan nilai IKK Kota Bogor hanya mendapat nilai 65 point, antara lain:

- 1) Kurangnya proses kajian dan analisis kebijakan yang di dukung oleh data, informasi dan pengetahuan yang fluktuat yang relevan dengan kondisi dilapangan.
- 2) Pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan publik perlu dilakukan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan.
- 3) Kurangnya proses dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor kebijakannya.
- 4) Kurangnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis kebijakan dalam seluruh proses kebijakan yang dilakukan.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi antara lain dengan memperkuat ketersediaan dan kualitas data, memperbaiki tatakelola administrasi dalam penyusunan Kebijakan dan memberikan bimbingan teknis kepada SDM yang ada, dan melakukan Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan dan Pengukuran IKK.

Meningkatnya kualitas kebijakan Kota Bogor di dukung oleh satu program yaitu program penelitian dan pengembangan. Adapun efisiensi sumber daya

yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja di atas sebesar 0,54% atau setara dengan Rp. 2.176.100 dari pagu anggaran sebesar Rp. 402.511.100 dengan realisasi sebesar Rp. 400.335.000.

2) Sasaran Strategis Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, dan Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target, dalam pencapaiannya di dukung oleh 2 Program dan 5 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	
Indikator Sasaran	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	
Program	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Program	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP
	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPDP
Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.1 Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari Hasil Penilaian SAKIP Tingkat Kota



Sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor tercermin dari pencapaian nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dari hasil penilaian SAKIP tingkat Kota. Sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bogor Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/227/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 capaian nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja Kota Bogor sebesar 93,96% yaitu dari target sebesar 26 poin, terealisasi sebesar 24,43 poin, meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,38 point, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 24.05 point, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -2,24% dari tahun 2023. Dalam aspek perencanaan jangka menengah (Renstra), realisasinya belum mencapai target, dimana target yang ditetapkan sebesar 26 point, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 24,43 point dengan capaian sebesar 93,96%. Karena tidak tersedianya data rata-rata realisasi Nasional menyebabkan indikator ini tidak dapat di analisis, sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja Kota Bogor berada di atas rata-rata, dimana rata-rata nilainya sebesar 22,08 poin dan Kota Bogor berada di urutan ke 4 se Provinsi Jawa Barat, jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat, Nilai kota bogor masih berada

di bawahnya, dimana nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja Provinsi Jawa Barat sebesar 26,32 Poin.

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja karena:

- 1) Rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja di perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan belum merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis perangkat daerah.
- 2) Penjenjangan kinerja perangkat daerah belum belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan sebab akibat.
- 3) Penjenjangan kinerja Sebagian perangkat daerah belum mempertimbangkan *cross-cutting* kinerja dengan unit/instansi lain.

Perbaikan yang diperlukan untuk mengakselerasi kinerja nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja tahun 2025 adalah lebih intens melakukan pendampingan kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan baik Rencana Strategis maupun Rencana Kerja serta membimbing perangkat daerah dalam penyusunan penjenjangan kinerja.

sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor didukung oleh 2 program yaitu program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2 Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target



Capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor tercermin dari pencapaian persentase indikator kinerja sasaran pembangunana daerah yang mencapai target. Capaian persentase indikator kinerja sasaran pembangunana daerah yang mencapai target pada tahun 2024 sebesar 83,46% capaian ini lebih rendah -4,54% dari capaian tahun 2023 sebesar 88%, dimana realisasi pada tahun 2024 sebesar 70,00%, realisasi ini juga mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar -0,97 poin dimana realisasi nya sebesar 70,79%. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian pada tahun 2024 sebesar 83,46% dimana realisasinya masih berada di bawah target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 83,87% dengan realisasi 70,00%. Jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional capaian ini tidak bisa di analisis karena tidak tersedianya data terkait rata-rata capaian IKU Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa barat, realisasi Kota Bogor masih berada di bawa realisasi tahun 2023 diamana realisasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 95%, sedangkan Kota Bogor sebesar 70,00%.

Faktor yang menjadi pengahbat pencapaian persentase indikator kinerja sasaran pembangunana daerah yang mencapai target yaitu capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan dimana capaian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada tahun 2024 sebesar 88,67% dengan realisasinya sebesar 72,68% dari target sebesar 81,88%, sedangkan capaian bidang infrastruktur dan kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 98,18% dengan realisasi sebesar 71,67% dari target sebesar 73%, ketidak tercapaian ini disebabkan karena masih terdapat Sub Kegiatan yang keluarannya (aktivitas Keegiatannya) tidak mendukung terhadap pencapaian Kegiatan dan Program, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target Kegiatan dan Program yang mendukung sasaran strategis/ IKU tersebut. Dari ketidak tercapaian yang telah di sebutkan di atas menyebabkan 9 indikator tidak tercapai, 21 Indikator yang tercapai dan 1 indikator belum terdapat datanya dari 31 indikator yang menjadi target dalam RPJMD Kota Bogor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	TARGET TAHUN		%
			2024		
			Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,18	75,8	102,18
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	72,00	73,11	101,54
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	58	69,60	120,00
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak	%	88,76	90,17	101,59

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	TARGET TAHUN		%
			2024		
			Target	Realisasi	
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	72,42	75,62	104,42
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	75,10	79,43	105,77
7	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	8,55	6,07	70,99
8	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	1,77	1,72	97,18
9	Persentase Reduksi Sampah	%	7,90	7,98	101,01
10	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	38,17	50,89	133,32
11	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	79,814	86,51	108,39
12	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,25	4,26	100,24
13	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,87	10,71	98,53
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	13,51	96,29
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	67,05	NA	100
16	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	100
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,50	71,13**	96,78
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,26	79,98**	100,91
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A**	100
20	Level Kematangan Smart City	Level	integrative	Smart	100
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,37	8,13	78,40
22	Angka Kemiskinan	%	6,21	6,53	105,15
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	85,20	85,20	100,00
24	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Milyar Rp	39181	38.965	99,45
25	PDRB Per Kapita (Atas dasar harga berlaku)	Juta Rp	50,41	56,62**	112,31
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12290	13154	107,03
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	25,00	15,81*	63,24
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	51,47	51,47
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	62,5	62,50
30	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	90,00	90,05	100,06
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	44	60,07	136,52

Tabel 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

*) Data sementara

**) Data tahun lalu

Dalam rangka mengakselerasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan daerah yang mencapai target pada tahun 2025 diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi yaitu pendampingan berupa asistensi kepada perangkat daerah khususnya yang targetnya tidak tercapai, agar melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian outcome yang ingin dicapai.

Capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah di dukung didukung oleh 2 program yaitu program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di ukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah dalam pencapaiannya di dukung oleh 1 Program dan 4 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel
Indikator Sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah
Program	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah



Keberhasilan meningkatnya tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Bapperida Kota Bogor tercermin dari pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah yang dicapai pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 102,76% dimana realisasinya sebesar 92,38 point atau predikat **AA** atau **Sangat Memuaskan** dari target sebesar 89,9 poin dan Bapperida Kota Bogor menempati urutan ke 2 dari total 30 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Dokumentasi



Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, efisiensi, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Jika dilihat dari capaiannya, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -8,11% dimana capaian tahun 2023 sebesar 110,86%, meskipun begitu realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,58 point dari tahun 2023 dimana realisasinya sebesar 89,8 poin dan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Reformasi Kota Bogor, Bapperida masih lebih baik sebesar 2,42 di mana realisasinya sebesar 89,96 poin. Jika dilihat dari persepektif dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian tahun 2024 telah melebihi target yaitu sebesar 102,76% dengan realisasi sebesar 92,38 poin dari target sebesar 89,9 poin. Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi Nasional, Kota Bogor masih berada lebih baik 33,06 poin, dimana rata-rata nasionalnya sebesar 59,32 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor masih lebih baik sebesar 8,97 poin dimana rata-ratanya

sebesar 83,41 poin dan jika di dibandingkan dengan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, Indeks Kota Bogor lebih rendah sebesar -6,26 dimana realisasinya sebesar 98,64 poin dan nilai tersebut masih bisa berubah karena masih menunggu hasil sangaah.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida yaitu Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel dan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah yang di tandai dengan tercapainya target realisasi nilai AKIP Bapperida tahun 2024 sebesar 89,50 poin atau predikat **A** dari target yang telah ditetapkan yaitu predikat **A** dan target realisasi rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah tahun 2024 sebesar 3,62 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,55 poin.

Pada tahun 2024 pengukuran Indeks Reformasi di lingkup Kota bogor telah menggunakan sistem informasi yang bernama Sistem Pengukuran Reformasi Terintegrasi (SURABI) yang rincian nilainya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida kota Bogor Tahun 2024

No	Indikator Penilaian	Nilai
1	Capaian Sasaran Strategis	91.92
2	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	88.25
3	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	100.00
4	Strategi Membangun RB Tematik	100.00
5	Capaian Dampak RB Tematik	95.00
Nilai Akhir		92.38

Tabel 11 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida kota Bogor Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat kita lihat nilai terendah dari indikator penilaian adalah “Capaian Pelaksanaan RB”, faktor penyebab rendahnya nilai ini karena terdapat beberapa indikator dari capaian pelaksanaan RB yang masih kurang, diantaranya Tingkat kematangan Zona Integritas (ZI) dan Tindaklanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR), dimana masih sedikit jumlah pengaduan yang ditujukan ke Bapperida Kota Bogor.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida tahun 2025 diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi antara lain:

- 1) Dalam rangka perbaikan tingkat kematangan ZI
 - Rencana Kerja ZI yang mengakomodir isu strategis.
 - Perbaikan atau penataan kembali administrasi terkait kematangan ZI
- 2) Pembentukan Tim yang menangani pengaduan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala

Meningkatnya tata kelola yang efektif, efisien dan akun tabel di lingkup Bapperida Kota Bogor di dukung oleh satu program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Adapun efisiensi sumber daya

yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja di atas sebesar 0,7% atau setara dengan Rp. 125.099.197 dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.755.985.035 dengan realisasi sebesar Rp. 17.630.885.838.

B. ANALISIS EFISIENSI

Pada Tahun 2024 Bapperida Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 22.909.338.805.- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.611.399.078.- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 98.70%, realisasi tersebut masuk kedalam kategori **“Sangat Baik”**. Rincian Anggaran per sasaran pada Bapperida Kota Bogor Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 12

Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Program	Tahun 2024		
			Pagu	Realisasi	Persen Realisasi
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	1.527.510.070	1.494.615.890	97,85
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan valuasi Pembangunan daerah	2.768.902.900	2.651.179.550	95,75
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	856.940.800	834.717.800	97,41
3	Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.755.985.035	17.630.885.838	99,30
JUMLAH			22.909.338.805	22.611.399.078	98,70

Tabel 12 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran pada setiap sasaran di atas 90% dimana realisasi tersebut termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Pada pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran yang rata-rata merupakan hasil efisiensi pada belanja pengadaan barang dan jasa. Sasaran dan program di dukung oleh kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 13

Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PERENCANAAN	21.381.828.735	21.116.783.188	98,76
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.052.300	22.926.000	76,29
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.740.500	15.337.800	81,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.432.400	3.713.100	49,96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.879.400	3.875.100	99,89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.698.249.192	14.691.709.942	99,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.616.554.492	14.610.834.442	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.901.900	5.082.700	86,12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	75.792.800	75.792.800	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.126.673.635	1.109.755.577	98,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.993.000	12.827.300	98,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.769.100	67.768.253	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.909.000	21.848.000	75,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.499.535	21.032.000	89,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	993.503.000	986.280.024	99,27
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.422.400	74.488.340	97,47
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.422.400	74.488.340	97,47
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.211.908	1.117.719.101	98,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.072.860	148.730.393	96,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979.139.048	968.988.708	98,96
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.375.600	614.286.878	88,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.040.000	242.019.148	83,44
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.199.200	88.128.600	75,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.136.400	284.139.130	99,65
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.458.996.900	2.382.609.550	96,89
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.820.800	100.856.800	98,09
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	699.355.800	689.409.400	98,58
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	219.998.000	215.524.600	97,97

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.436.822.300	1.376.818.750	95,82
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	185.460.000	146.808.000	79,16
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.988.000	55.846.000	73,49
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	109.472.000	90.962.000	83,09
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	124.446.000	121.762.000	97,84
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	124.446.000	121.762.000	97,84
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	574.480.000	566.530.000	98,62
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	574.480.000	566.530.000	98,62
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.460.800	268.187.800	94,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.834.000	40.484.000	96,77
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.965.000	224.807.000	99,49
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14.661.800	2.896.800	19,76
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.527.510.070	1.494.615.890	97,85
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	402.511.100	400.335.000	99,46
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	402.511.100	400.335.000	99,46
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	321.688.200	312.319.190	97,09
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	100.679.900	98.880.590	98,21
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	221.008.300	213.438.600	96,57
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	354.071.070	340.300.000	96,11
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	354.071.070	340.300.000	96,11
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	449.239.700	441.661.700	98,31
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	425.059.800	418.081.800	98,36
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	24.179.900	23.579.900	97,52
	JUMLAH	22.909.338.805	22.611.399.078	98,70

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Sumber: Laporan Keuangan Bapperida Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2024. LKIP menggambarkan Kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

LKIP digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra perangkat daerah dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sehingga memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan *critical point* yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan Bappeda yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bapperida Kota Bogor di tahun berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik Bapperida Kota Bogor terus menerus mengupayakan perbaikan kinerja. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, *coaching clinic*, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkala;
3. Memperkuat koordinasi antar bidang lingkup Bapperida serta kolaborasi dengan mitra perangkat daerah.

A. KESIMPULAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator yang ditetapkan yaitu:

Tabel 14

**Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bogor Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Baik	Baik	100	Sangat Baik
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	100	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Point	26	24,43	93,96	Sangat Baik
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	83,87	70	83,46	Tinggi
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	89,90	92,38	102,76	Sangat Baik

Tabel 14 Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dari Ke 6 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator kinerja sasaran yang mencapai target, adapun indikator kinerja yang mencapai target yaitu:

1. Kategori Inovasi Daerah (100%);
2. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (100%);
3. Indeks Kualitas Kebijakan (100%);
4. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah (102,76%).

Sedangkan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target yaitu:

1. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota (93,96%);
2. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target (83,46%).

Dari hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2023 terdapat 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target, yaitu (1) Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota dengan nilai sebesar 24,05 (96,2%); dan (2) Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target, ketidak tercapaian tersebut disebabkan karena faktor -faktor sebagai berikut:

1. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota:
 - a. Masih terdapat rumusan sasaran strategis serta indikator yang belum berorientasi hasil;
 - b. Masih terdapat penjenjangan kinerja yang belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja
 - c. Masih di temukan perbedaan indikator kinerja antara perjanjian kinerja dengan IKU.
2. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target:
 - a. Tidak tercapainya indikator kinerja program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja sasaran tersebut, yaitu:
 - Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia (69,44%);
 - Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan (74%);
 - Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi Pembangunan (95%).

Pada Tahun 2024 Bapperida Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 22.909.338.805.- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.611.399.078.- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 98.70%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 297.939.727.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Tujuh Ratus Dua puluh Tujuh Rupiah)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bapperida, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Setelah itu baru ditetapkan sasaran yang ingin dicapai mengacu

pada dokumen RENSTRA/RENJA, yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing target kinerja sasaran.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Demi terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2024.
2. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah melalui proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
4. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
5. Secara internal melakukan perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bapperida dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada publik baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berperan dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.